

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pembanding sekaligus pelengkap, peneliti akan mengulas beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Tinjauan pustaka yang akan digunakan berupa jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding dengan penelitian yang akan ditulis nanti. Adapun tinjauan pustaka tersebut sebagai berikut:

Pertama, buku yang berjudul *“Public Preferences and Institutional Design: Israel and Turkey Compared”* oleh Niva Golan-Nadir.¹² Buku ini menjelaskan perbedaan antara desain institusional dan preferensi publik dalam demokrasi modern. Dukungan warga yang rendah dapat menimbulkan masalah serius bagi sistem demokrasi karena hubungan antara institusi negara dan sikap warga negara merupakan subjek yang sangat relevan dalam memicu perdebatan mengenai kinerja demokrasi (penyampaian nilai-nilai demokrasi). Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara berusaha untuk tetap berpegang teguh pada rancangan yang sudah dibuat dan menghindari tantangan sosial semacamnya dengan menggunakan taktik-taktik kelembagaan.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul *“Israeli-Turkish Rapprochement in the 1990s: Why an Alliance”* oleh Levent Duman.¹³ Jurnal ini menjelaskan perkembangan hubungan Turki dan Israel sejak tahun 1990-an. Faktor yang menyebabkan Turki menjalin hubungan dengan Israel di tahun 1990-an. Tiga penjelasan berbeda dalam pemulihan hubungan kedua negara yaitu pendekatan pertama struktur politik internal Turki, pendekatan kedua hubungan Turki-AS, dan pendekatan ketiga hubungan internasional dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah yang mana saat itu terdapat kekuatan-kekuatan besar negara Arab di Timur

¹² Golan-Nadir, Niva. (2022). *Public Preferences and Institutional Design: Israel and Turkey Compared*. Switzerland: Springer Nature

¹³ Duman, Levent. (2020). *Israeli-Turkish Rapprochement in the 1990s: Why an Alliance?*

Tengah. Dapat dikatakan bahwa pemulihan hubungan Turki dan Israel pada taun 1990-an terjadi sebagai akibat dari perimbangan kekuatan dan hubungan rumit yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul *“Israel and Turkey: Once Comrades Now Frenemies”* oleh Tugce Ersoy Ceylan.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan krisis yang mendalam antara hubungan Turki dan Israel, terutama sejak tahun 2009 yang mana awal kemunduran hubungan bilateral kedua negara bermula pada tahun 2000-an. Menggunakan analisis Kennent Waltz yang menjelaskan keretakan dan kebuntuan hubungan bilateral kedua negara dibagi menjadi tiga tingkat. Hubungan bilateral telah terbentuk pada tiga tingkatan dalam waktu yang berbeda dan bahwa kemunduran dan perbaikan hubungan bilateral bergantung pada identitas dan ideologi kepemimpinan pada tingkat individu, faktor domestik pada tingkat negara, dan faktor struktural pada tingkat sistemik.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul *“Turkey and the changing energy geopolitics of Eurasia”* oleh Emre Ersena dan Mitat Celikpala.¹⁵ Jurnal ini menjelaskan peran penting Turki sebagai negara transit energi baik minyak maupun gas alam. Turki aktif menjalin kerjasama dengan negara di lingkungan terdekatnya untuk mengeksport dan mengimpor minyak dan gas alam melalui proyek jalur pipa yang dimilikinya. Konflik regional yang terjadi memberi dampak negatif terhadap pengembangan rute transportasi energi di Eurasia yang menghadirkan tantangan kebijakan luar negeri yang besar bagi Ankara agar tetap menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan Barat dan Rusia.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul *“Europeanization of Turkey’s Foreign Policy: The Case of Turkey’s Mediation in the Israel–Palestine Conflict”* oleh Esengul Ayaz Avan, *Journal of Balkan and Near Eastern*.¹⁶ Jurnal yang menjelaskan kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah yang

¹⁴ Ceylan, Tugce Ersoy. (2021). *Israel and Turkey: Once Comrades Now Frenemies*

¹⁵ Ersena, Emre dan Mitat Celikpala. (2019). *Turkey and the changing energy geopolitics of Eurasia*

¹⁶ Avan, Esengul Ayaz. (2018). *Europeanization of Turkey’s Foreign Policy: The Case of Turkey’s Mediation in the Israel–Palestine Conflict*. *Journal of Balkan and Near Eastern*.

menunjukkan beberapa perubahan pada akhir tahun 1990-an. Ketika pemerintahan AKP berkuasa, Turki mulai aktif menjalankan kebijakan di kawasan dan memainkan peran mediasi di antara aktor-aktor kawasan yang berbeda. Upaya Turki untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina melalui cara damai sesuai dengan kebijakan dan norma EU. Keterlibatan Turki dengan mengadopsi norma, nilai dan kebijakan EU adalah upaya mempromosikan kepentingannya dan pertimbangan pemerintah Turki tersebut akan memberikan tempat yang nyaman bagi Turki dalam agenda politik Turki di tingkat regional.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada kepentingan yang di dapatkan Turki dari normalisasi hubungannya dengan Israel tahun 2022. Letak geografis Turki yang strategis yaitu di antara Asia dan Eropa memberikan keuntungan Turki untuk bisa menjalin hubungan dengan negara-negara Asia maupun negeri-negara Eropa. Di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, hubungan Turki dan Israel berakhir tragis. Turki aktif menyuarakan kemendekaan Palestina di PBB dan mengecam setiap tindakan-tindakan yang Israel lakukan kepada warga Palestina.

Putusnya hubungan bilateral Turki dan Israel tidak mempengaruhi perdagangan antar kedua negara. Tingkat perdagangan yang terus meningkat tiap tahunnya memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Turki. Pada awal kepemimpinan Erdogan perekonomian Turki cukup stabil dan mengarah pada tren yang baik namun karena kebijakan ekonomi yang salah di tahun 2021 menjadikan nilai tukar mata uang Lira anjlok. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada perekonomian global sehingga banyak negara yang mengalami inflansi salah satunya Turki. Inflasi yang sudah mencapai 70 persen tersebut membawa Turki pada jurang resesi. Sebagai upaya untuk menghindari kehancuran ekonomi negerinya, Turki mulai melakukan dialog dengan Israel membahas normalisasi hubungan antar kedua negara. Adanya kekhawatiran akan ancaman militan Kurdi yang mendapatkan perlindungan dari Amerika. Upaya normalisasi yang dilakukan bukan serta merta merupakan tindakan gegabah Turki guna menyelamatkan perekonomian negerinya namun dibaliknya ada kepentingan yang

akan Turki dapat dari membaiknya hubungan kedua negara. Adapun kepentingan yang didapat Turki meliputi sektor ekonomi, sektor militer, dan sektor politik.

2.3 Landasan Teori

Sebagai acuan dalam memahami suatu permasalahan sekaligus menjawab pertanyaan dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan Teori Kepentingan Nasional dan Normalisasi untuk menganalisis kepentingan Turki dalam normalisasi hubungan dengan Israel tahun 2022.

2.3.1 Kepentingan Nasional

Dalam hubungan Internasional, negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai aktor utama dalam politik dunia. Dunia internasional yang penuh dengan konflik mengharuskan setiap negara memiliki tujuan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga keberlangsungan hidupnya melalui pemenuhan kepentingan nasional. Menurut H. J Morgenthau, kepentingan nasional adalah seperangkat tujuan yang dimiliki oleh negara untuk memaksimalkan potensi negara dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pandangan *realisme*, kepentingan nasional akan selalu dikaitkan dengan *power*. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi mampu memaksa penduduknya terikat dan patuh pada setiap keputusannya.¹⁷ Kepentingan nasional dapat berubah setiap saat sesuai dengan situasi dan kebutuhan suatu negara.

Konsep kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang menggambarkan kehidupan suatu bangsa baik di tingkat domestik maupun internasional. Ada empat dasar kepentingan nasional, yaitu:¹⁸

1. Kepentingan keamanan, cara suatu negara untuk memberikan keamanan kepada warga negaranya dengan mengandalkan dan memaksimalkan kemampuannya sendiri (*self-help*) tanpa bergantung keamanan dan keberlangsungan hidupnya pada negara dan institusi lain.

¹⁷ Danau. David A. The State and International Relations.

¹⁸ Hans. J Morgenthau. Another Great Debate. The National Interest of the United States. The American Political Science Review XLVI

2. Kepentingan ekonomi, bagaimana upaya negara untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian dunia. Merupakan faktor utama yang selalu mendasari kepentingan nasional setiap negara.
3. Kepentingan tatanan dunia adalah upaya bangsa-bangsa untuk mencapai perdamaian dunia, terutama dengan negara-negara di kawasan. Umumnya dalam bentuk kerjasama yang terjalin antara negara-negara di kawasan untuk menyamakan visi bersama dalam pengaulan internasional.
4. Kepentingan akan nilai-nilai yaitu memberikan gambaran atas nilai-nilai yang dianutnya kepada masyarakat internasional sehingga mengetahui posisi suatu negara dalam hubungan internasional.

Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan elemen penting dalam berinteraksi dengan aktor lain karena dapat mencerminkan bagaimana kebijakan negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, kepentingan nasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara sebab kedua hal tersebut memiliki keterkaitan erat. Peneliti memilih teori ini karena menjelaskan perihal asumsi dasar kepentingan nasional terkait hubungannya dengan normalisasi antara Turki dan Israel.

2.3.2 Normalisasi

Normalisasi sebagai sebuah proses untuk mengakhiri konflik melalui gencatan senjata, kesepakatan damai, atau pemulihan hubungan diplomatik.¹⁹ Normalisasi dapat terjadi saat salah satu pihak yang berselisih menyadari bahwa adanya kebutuhan terhadap pihak musuh. Ketegangan hubungan kedua pihak dapat dicairkan dengan mencari solusi atas pertentangan yang selama ini terjadi. Umumnya normalisasi akan terjadi apabila kedua pihak sepakat pada masing-masing poin perdamaian yang ditandai dengan penjanjian damai dan pulihnya

¹⁹ Ashari, Khasan. 2015. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Nuansa Cendekia

hubungan diplomatik. Barston, menjelaskan bahwa terdapat sepuluh tahap dalam proses normalisasi:²⁰

1. Membangun hubungan kembali, melalui jalur formal atau informal.
2. Gabungan informal, misalnya dengan menyepakati gencatan senjata atau pertukaran tawanan.
3. Sinyal tingkat rendah, dengan melakukan hubungan informal secara rahasia dan pembukaan kembali hubungan diplomatik secara terbatas.
4. Membuka kembali hubungan perdagangan dan perbankan secara terbatas.
5. Membuka kembali jalur negosiasi, secara langsung atau rahasia dengan mediasi pihak ketiga.
6. Menghapuskan hambatan perdagangan atau cetak embargo.
7. Revisi kebijakan, buat konsesi baru yang berhubungan dengan upaya normalisasi.
8. Negosiasi isu-isu utama dalam normalisasi.
9. Membuat kesepakatan normalisasi dan membangun kembali hubungan diplomatic,
10. Implementasi normalisasi.

Dalam beberapa kasus, normalisasi bisa dinegosiasikan secara cepat dan langsung apabila ada keadaan darurat dan kebutuhan yang sangat mendesak.²¹ Seperti pernyataan sepihak tentang hubungan kedua negara, pernyataan bersama, pembicaraan informal yang dilengkapi dengan perjanjian normalisasi hingga perjanjian normalisasi tersebut dinyatakan bersifat formal. Serta pertukaran diplomatik informal antar kedua negara, pernyataan permintaan maaf dan pernyataan kebijakan yang direvisi sesuai dengan kesepakatan dalam normalisasi. Pembukaan kembali konsulat masing-masing negara sebagai fasilitator dalam perdagangan yang mana dianggap lebih penting daripada menyelesaikan perselisihan politik yang sudah berlangsung lama.

²⁰ Barston, R.P. 2014. *Modern Diplomacy*. New York: Routledge

²¹ *ibid*

Kesepakatan untuk menormalkan hubungan cenderung terbagi dalam beberapa bentuk. Berdasarkan tujuan kejelasan, maka proses normalisasi dibagi melalui empat lensa konseptual yang berbeda dan saling berhubungan erat, antara lain:²²

1) Normalisasi sebagai generalisasi virtual

Konsep ini menjelaskan tingkat keterlibatan pemerintah sub-negara bagian di ranah internasional yang begitu ‘intensif dan ekstensif’ di seluruh dunia, sehingga menuntut perhatian yang lebih besar. Peran nyata tersebut dapat dilihat dari upaya untuk mempromosikan perdagangan dan investasi luar negeri, pemeliharaan delegasi permanen di luar negeri, perluasan perjanjian internasional melalui beragam mekanisme *soft-law*, partisipasi terbatas dalam proses pembuatan perjanjian internasional dalam kasus-kasus yang ditetapkan secara konstitusional – misalnya Austria, Belgia, atau Jerman – partisipasi intensif dalam skema negosiasi multilateral atas dasar geografis atau fungsional, hubungan langsung dengan organisasi internasional, pengiriman dan penyelenggaraan misi internasional, pernyataan politik mengenai isu-isu internasional, kampanye dan diplomasi publik, program bantuan luar negeri dan skema kerja sama lingkungan lintas nasional. Semua hal ini adalah praktik umum bagi pemerintah sub-negara bagian di seluruh dunia.

2) Normalisasi sebagai regional yang berbeda

Skema integrasi regional memiliki implikasi yang signifikan di tingkat domestik yang menciptakan pembatasan dan peluang institusional baru dan mendorong mobilisasi pemerintah sub-negara bagian di ranah internasional. Hubungan antara kondisi struktural yang lebih luas yang ditimbulkan oleh skema integrasi regional seperti UE, NAFTA, Mercosur atau ASEAN dan beragam model aktivitas internasional yang diadopsi oleh pemerintah sub-negara di masing-masing wilayah. Dengan kata lain, ada hubungan structural antara ‘makro-regionalisme’ dan ‘mikro-regionalisme’. Makro-

²² Cornago, Noe. On the Normalization of Sub-State Diplomacy. The Hague Journal of Diplomacy

regionalisme menciptakan struktur peluang baru serta kendala baru melalui integrasi ekonomi dan pembangunan kelembagaan, sedangkan mikro-regionalisme mengungkapkan kemampuan untuk pembelejaran dan adaptasi kebijakan bersama pemerintah sub-negara bagain dalam masing-masing ruang regional makro yang diciptakan oleh negara berdaulat. Proses regionalisasi ini memungkinkan pemerintah sub-negara bagian untuk mengadopsi bentuk proyeksi internasional yang dibutuhkan dalam masing-masing bidang.

3) Normalisasi sebagai adaptasi reflektif

Proses adaptasi ini tidak menandakan langkah menuju keseragaman. Perbedaan yang menonjol dapat terlihat dari tujuan dan cara di antara pemerintah sub-negara dalam keterlibatannya di dunia internasional. Perbedaan tersebut merupakan hasil yang tidak dapat terhindarkan dari konteks geopolitik mereka yang sangat beragam, seperti sifat konstitusional, ukuran demografis, kondisi kelembagaan, kekhasan budaya, sumber daya ekonomi, dan sebagainya. Namun karena faktor tersebut maka sangat penting bahwa entitas-entitas yang heterogen tersebut mampu bekerja sama dalam bentuk yang efisien dan stabil meskipun terdapat perbedaan kelembagaan yang sangat besar.

4) Normalisasi sebagai *contentious regulation*

Dalam beberapa decade terakhir diplomasi yang disesuaikan dengan tuntutan kapitalisme semakin meningkat. Konteks baru ini telah memfasilitasi aktivisme internasional baru bersama pemerintah sub-negara yang tampak sulit dikendalikan dan perlu diatur kembali. Sebagai upaya untuk menanggapi situasi baru ini, negara-negara di seluruh dunia telah membentuk hukum dan kelembagaan yang berbeda untuk mengakui peran aktif pemerintah sub-negara dalam mendesain kebijakan luar negeri dan mesin diplomasinya. Dalam beberapa kasus, kerangka hukum yang ada merupakan hasil dari seringnya perselisihan yang berujung kontroversi hukum yang kemudian diselesaikan melalui keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh mahkamah agung.

Di lingkup internasional, normalisasi memungkinkan sistem diplomasi di lingkungan yang semakin kompleks, adaptif dan pertahanan diri sendiri. Dalam kasus diplomasi sub-negara, telah dijelaskan empat utama proses normalisasi. Pada penelitian ini, normalisasi yang dilakukan antara Turki dan Israel dapat digolongkan sebagai normalisasi generalisasi virtual. Turki yang berada di posisi menguntungkan yaitu di Asia dan Eropa mulai berperan aktif dalam isu-isu global di kawasan yang memberi dampak pada posisi Turki yang mulai menguat dan menjadi perhatian negara-negara lain di dunia. Peran nyata Turki dapat dilihat dari upaya Turki dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.

2.3.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

